



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 200 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA INDIKATOR KINERJA UTAMA
MAHKAMAH KONSTITUSI, INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPANITERAAN DAN
SEKRETARIAT JENDERAL SERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO/PUSAT/INSPEKTORAT DI LINGKUNGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN ANGGARAN 2020 - 2024
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan capaian dan realisasi kinerja Mahkamah Konstitusi melakukan beberapa penyesuaian target kinerja untuk tahun 2024, dipandang perlu menyusun perubahan ketiga Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 5.2 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 2.1 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi Tahun 2022-2024, pembangunan reformasi birokrasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja sebagai leading sector;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf **a** dan huruf **b**, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Perubahan Ketiga Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal, serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020 – 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);



2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 5.2 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekrataris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 2.1 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi Tahun 2022-2024.



- Memperhatikan : 1. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu melakukan penyempurnaan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil sesuai levelnya dan indikator kinerja yang SMART pada level lembaga hingga unit terkecil;
2. Hasil Evaluasi atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2024 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu melakukan penyempurnaan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERUBAHAN KETIGA INDIKATOR KINERJA UTAMA MAHKAMAH KONSTITUSI, INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL SERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO/PUSAT/INSPEKTORAT DI LINGKUNGAN MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN ANGGARAN 2020-2024.**

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam lampiran 1, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan sebagaimana tercantum dalam lampiran 2, Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal sebagaimana tercantum dalam lampiran 3, Indikator Kinerja Utama Biro sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 s.d. 8, Indikator Kinerja Utama Pusat sebagaimana tercantum dalam lampiran 9 s.d. 11, Indikator Kinerja Utama Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran 12 di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020-2024.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menyusun perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi 2020-2024.



- KETIGA : Masing-masing Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal setiap akhir tahun wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja Biro/Pusat dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, untuk disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- KEEMPAT : Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi wajib melakukan *Review* atas capaian kinerja setiap unit;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 16 Mei 2024

**SEKRETARIS JENDERAL,
HERU SETIAWAN**

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Y.M. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Y.M. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;
3. Yth. Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
4. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Yth. Kepala Biro/Pusat/Inspektur di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;



LAMPIRAN KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 200 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA INDIKATOR KINERJA UTAMA
MAHKAMAH KONSTITUSI, INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
SERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO/PUSAT/INSPEKTORAT
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN ANGGARAN 2020-2024



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2020-2024**

Wewenang:

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran Partai Politik;
4. Memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum;
5. Memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Terpercaya	1. Nilai Reformasi Birokrasi					Indeks 77	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	Kemenpan RB
		2. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	BPK
		3. Indeks Integritas	Skor 75	Skor 75	Skor 75	Skor 75	Skor 80	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	KPK



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2020	2021	2022	2023	2024		
		4. Indeks Layanan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi				Skor 80	Skor 81	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	Biro Renkeu Melalui metode survei
		5. Indeks Sistem Merit				Indeks 0,81	Nilai 392,5 Indeks 0,96	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	KASN
		6. Indeks SPBE					Indeks 3,36	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	Kemenpan RB
2.	Meningkatnya kesadaran Masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi	1. Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75	Skor 75	Skor 75	Skor 75		Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal (Pusdik Pancasila dan Konstitusi)	Pusdik Pancasila dan Konstitusi
3.	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	1. Indeks pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi					Skor 76	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal (Pusdik Pancasila dan Konstitusi, Biro HAK, Pusat P4, Biro HP)	Biro Renkeu Melalui metode survei



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2020	2021	2022	2023	2024		
4.	Meningkatnya Supremasi Hukum dan kualitas putusan	1. Indeks Kualitas Putusan	Skor 60	Skor 62	Skor 64	Skor 66	Skor 87	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal (Biro Hukum dan Adm Kepaniteraan, Pusat P4)	Kepaniteraan, Biro HAK, Pusat P4 selanjutnya akan diolah oleh Biro Renkeu
		2. Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi	Skor 70	Skor 72	Skor 74	Skor 76	Skor 88	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK (Biro Hukum dan Adm Kepaniteraan, Biro HP, Pusat P4, Pusat TIK)	Kepaniteraan, Biro HAK, Biro HP, Pusat P4, dan Pusat TIK selanjutnya akan diolah oleh Biro Renkeu



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2020-2024**

Nama Unit Organisasi:

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

Tugas:

1. Koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi;
2. Pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara;
3. Pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi:

Menyelenggarakan tugas teknis administratif peradilan.

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Meningkatnya mutu penanganan perkara Konstitusi	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi	Skor 80	Skor 80	Skor 80	Skor 80	Skor 88	Kepaniteraan	Biro Renkeu Melalui metode survei eksternal



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2020	2021	2022	2023	2024		
		2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus	70%	73%	73%	73%	73%	Kepaniteraan	Kepaniteraan Biro HAK
		3. Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, Dan Perkara Lainnya	Maksimal 12 bulan	Kepaniteraan	Kepaniteraan Biro HAK				
		4. Persentase Jumlah Perkara PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota yang diputus		100%				Kepaniteraan	Kepaniteraan Biro HAK
		5. Persentase Jumlah Perkara PHPU dan/atau PHPKada yang diputus					100%	Kepaniteraan	Kepaniteraan Biro HAK



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2020	2021	2022	2023	2024		
		6. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHP Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai dengan UU		100%				Kepaniteraan	Kepaniteraan Biro HAK
		7. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU dan/atau PHPKada sesuai dengan UU					100%	Kepaniteraan	Kepaniteraan Biro HAK
		8. Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi				Skor 80	Skor 88	Kepaniteraan	Biro Renkeu Melalui metode survei eksternal
		9. Indeks Layanan Kepaniteraan			Skor 75	Skor 80	Skor 82	Kepaniteraan	Biro Renkeu Melalui metode survei internal



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2020	2021	2022	2023	2024		
2.	Meningkatnya Kualitas Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis	1. Tersedianya Dokumen Isu-Isu Hukum (Substansi atau Materi Peraturan MK dan/atau Petunjuk Teknis)	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok		Kepaniteraan	Kepaniteraan Biro HAK
		2. Persentase Tersedianya Daftar Inventaris Masalah					100%	Kepaniteraan	Kepaniteraan Biro HAK



Lampiran 3
Surat Keputusan Sekretaris Jenderal
Nomor: 200 TAHUN 2024
Tanggal: 16 Mei 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2020-2024**

Nama Unit Organisasi:

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

Tugas:

1. Koordinasi pelaksanaan administratif di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal;
2. Penyusunan rencana dan program dukungan teknis administratif;
3. Pelaksanaan kerja sama dengan masyarakat dan hubungan antarlembaga;
4. Pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi:

1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, administrasi hakim, administrasi kepaniteraan dan risalah, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan hubungan antarlembaga, tata usaha pimpinan dan protokol, arsip dan dokumentasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
3. Pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan;
4. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
5. Fasilitasi kesekretariatan tetap asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia dan/atau institusi sejenis;
6. Penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan perpustakaan dan sejarah konstitusi;
7. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
8. Pelaksanaan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
9. Pelaksanaan pengawasan intern; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Meningkatnya Hubungan Kerjasama Internasional yang efektif	1. Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Hasil Kegiatan Internasional	80%	95%	95%	95%		Biro Humas dan Protokol	-
		2. Persentase hasil kesepakatan kerjasama internasional yang ditindaklanjuti					60%	Biro Humas dan Protokol	Biro Humas dan Protokol
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan yang Bermutu dan Tepercaya	1. Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	1. Biro Renkeu 2. Biro Umum	BPK
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB	BB+	BB	Biro Renkeu	Kemenpan RB
		3. Indeks Layanan Administrasi Umum	Skor 75	Skor 77	Skor 79	Skor 80	Skor 81	Biro Renkeu	Biro Renkeu melalui survei internal
3	Meningkatnya kualitas Pengawasan Internal	1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	80%	80%	80%	85%		Inspektorat	Inspektorat
		2. Tingkat Maturitas SPIP					Level 3	Inspektorat	BPKP



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2020	2021	2022	2023	2024		
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan, Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Perlengkapan Barang Milik Negara serta Pelayanan Umum Lainnya	1. Tingkat Layanan Kerumahtanggaan , Perlengkapan, dan Pengamanan	Skor 80	Skor 80	Skor 80			Biro Umum	-
		2. Tingkat Digitalisasi Arsip				Skor 82	Skor 90	Biro Umum	Arsip Nasional
		3. Indeks Kualitas Pengelolaan Aset				Skor 80	Nilai 3	Biro Umum	Kementerian Keuangan
		4. Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)					Nilai 65	Biro Umum	LKPP
5	Terwujudnya SDM MK yang Kompeten dan Profesional	1. Persentase Program Pengembangan Kompetensi SDM	50%	80%	80%			Biro SDM dan Organisasi	-
		2. Indeks Sistem Merit				Indeks 0,81	Nilai 392,5 Indeks 0,96	Biro SDM dan Organisasi	KASN
6	Meningkatnya mutu penanganan perkara Konstitusi	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi	Skor 80	Skor 80	Skor 80	Skor 80	Skor 88	Biro Hukum dan Adm Kepaniteraan	Biro Renkeu melalui Survei Eksternal



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2020	2021	2022	2023	2024		
		2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus	70%	73%	73%	73%	73%	Biro Hukum dan Adm Kepaniteraan	Kepaniteraan Biro HAK
		3. Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, Dan Perkara Lainnya	Maks 12 Bulan	Maks 12 Bulan	Maks 12 Bulan	Maks 12 Bulan	Maks 12 Bulan	Biro Hukum dan Adm Kepaniteraan	Kepaniteraan Biro HAK
		4. Persentase Jumlah Perkara PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota yang diputus		100%					
		5. Persentase Jumlah Perkara PHPU dan/atau PHPKada yang diputus					100%	Biro Hukum dan Adm Kepaniteraan	Kepaniteraan Biro HAK
		6. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHP Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai dengan UU		100%					



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2020	2021	2022	2023	2024		
		7. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU dan/atau PHPKada sesuai dengan UU					100%	Biro Hukum dan Adm Kepaniteraan	Kepaniteraan Biro HAK
		8. Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi				Skor 80	Skor 88	Pusat Teknologi Informasi Komunikasi	Kemenpan & RB
7	Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara MK	1. Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	skor 75	skor 75	skor 75	skor 75		Pusdik Pancasila dan Konstitusi	-
		2. Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara					Skor 76	Pusdik Pancasila dan Konstitusi, Biro HP, Puslitka	Biro Renkeu melalui Survei Eksternal
8	Meningkatnya kualitas data dan informasi perkara serta putusan MK	1. Tingkat Akses terhadap data Informasi Penanganan Perkara secara online	80%	80%	80%	90%		Biro Humas dan Protokol	-



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2020	2021	2022	2023	2024		
		2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik					Nilai 90	Biro Humas dan Protokol	Komisi Informasi Pusat
		3. Indeks Aksesibilitas Penanganan Perkara					Nilai 70	Pusat TIK, Biro HAK, Biro HP, Kepaniteraan	Biro Renkeu melalui Survei Eksternal
10	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Nilai Reformasi Birokrasi	Skor 76	Skor 78	Skor 80	Skor 82	Indeks 78	Biro SDM dan Organisasi	Kemenpan & RB
		2. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri					Nilai 79	Seluruh Unit Kerja	Kemenpan & RB
		3. Indeks ASN BerAKHLAK					Nilai 61	Seluruh Unit Kerja	Kemenpan & RB
		4. Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektoral (EPSS)					Nilai 2,7	Biro Renkeu, Biro Hukum dan Adm Kepaniteraan, Pusdik	BPS
		5. Indeks Pelayanan Publik (IPP)					A	Biro Hukum dan Adm Kepaniteraan	Kemenpan & RB



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
TAHUN 2020-2024**

Nama Unit Organisasi:

Biro Perencanaan dan Keuangan

Tugas:

Melaksanakan perencanaan dan evaluasi, serta pengelolaan keuangan.

Fungsi:

1. Perencanaan program kerja dan anggaran, serta evaluasi kinerja; dan
2. Pengelolaan keuangan.

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Terwujudnya Layanan Perencanaan dan Evaluasi yang berkualitas	1. Persentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis, kinerja dan anggaran yang tepat waktu	85%	85%	85%	85%	100%	Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Renkeu
		2. Deviasi Perencanaan dan Realisasi Penarikan Dana	10%	10%	10%			Biro Perencanaan dan Keuangan	-



NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2020	2021	2022	2023	2024		
		3. Indeks Kualitas Pengelolaan Anggaran				Skor 85	Skor 93	Biro Perencanaan dan Keuangan	Kementerian Keuangan
		4. Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja MK yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Renkeu
		5. Persentase hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	80%	80%	80%	90%	92%	Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Renkeu
		6. Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan	Skor 75	Skor 77	Skor 79	Skor 81	Skor 81	Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Renkeu melalui Survei
		7. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional					Nilai 90	Biro Perencanaan dan Keuangan	Kementerian PPn/Bappenas
		8. Nilai SAKIP MK					BB	Biro Perencanaan dan Keuangan	Kemenpan & RB
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan yang transparan dan akuntabel	1. Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi	95%	95%	95%	95%	97%	Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Renkeu
		2. Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Renkeu
		3. Persentase Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Renkeu



NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2020	2021	2022	2023	2024		
		4. Opini BPK					WTP	Biro Perencanaan dan Keuangan	BPK
		5. Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu					100%	Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Perencanaan dan Keuangan	1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri					Nilai 79	Biro Perencanaan dan Keuangan	Kemenpan & RB
		2. Indeks ASN BerAKHLAK					Nilai 61	Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro SDMO
		3. Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektoral (EPSS)					Nilai 2,7	Biro Perencanaan dan Keuangan	BPS
		4. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko					Nilai 3	Biro Perencanaan dan Keuangan	Inspektorat
		5. Nilai Evaluasi SAKIP Biro Perencanaan dan Keuangan					B	Biro Perencanaan dan Keuangan	Inspektorat



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI
TAHUN 2020-2024**

Nama Unit Organisasi:

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Tugas:

Melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, dan pengelolaan penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi.

Fungsi:

1. Pengelolaan administrasi hakim dan pegawai, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
2. Penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi.

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Meningkatnya Manajemen Organisasi, Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas	1. Persentase tersusunnya dokumen penataan organisasi dan tata laksana berbasis IT	70%	75%	80%			Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Biro SDMO
		2. Persentase tersusunnya dokumen Reformasi Birokrasi	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Biro SDMO



NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2020	2021	2022	2023	2024		
		3. Nilai Reformasi Birokrasi					Indeks 78	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Kemenpan RB
		4. Indeks Efektifitas Kelembagaan				Skor 80	Skor 82	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Kemenpan & RB/Deputi Kelembagaan
		5. Indeks Pelayanan Publik (IPP)				Skor 80		Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	-
		6. Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja menuju WBBM				3 unit kerja	2 Unit Kerja	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Inspektorat
		7. Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi					Nilai 100	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Kemenpan & RB/Asdep Perumusan Kebijakan
		8. Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai					Nilai 4	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	system kelembagaan & tata laksana
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan SDM	1. Persentase terselenggaranya kegiatan pengembangan kompetensi SDM	50%	80%	80%	80%		Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Biro SDMO
		2. Tingkat Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian	Skor 75	Skor 80	Skor 80	Skor 80	Skor 80	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Biro Renkeu melalui Survei



NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2020	2021	2022	2023	2024		
		3. Indeks Sistem Merit				Indeks 0,81	Nilai 392,5 Indeks 0,96	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	KASN
		4. Persentase Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Administrasi Hakim dan ASN dan Pembinaan ASN					100%	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Biro SDMO
		5. Persentase Tersusunnya Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Pegawai Non ASN					100%	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Biro SDMO
		6. Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Kebutuhan dan Pengadaan ASN					100%	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Biro SDMO
		7. Persentase Tersusunnya Dokumen Sistem Manajemen Kepegawaian/ Sistem Informasi ASN					100%	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Biro SDMO



NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2020	2021	2022	2023	2024		
		8. Persentase Tersusunnya Dokumen Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, Kapabilitas dan Karier ASN					100%	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Biro SDMO
		9. Tingkat Kepuasan Layanan Kesehatan bagi Hakim, ASN, dan Non ASN					Skor 70	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Biro Renkeu melalui Survei
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri					Nilai 79	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Kemenpan & RB
		2. Indeks ASN BerAKHLAK					Nilai 61	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Kemenpan & RB
		3. Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektoral (EPSS)					Nilai 2,7	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	BPS
		4. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko					Nilai 3	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Inspektorat
		5. Nilai Evaluasi SAKIP Biro SDMO					B	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Inspektorat



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN
TAHUN 2020-2024**

Nama Unit Organisasi:

Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

Tugas:

Pelayanan hukum, pengelolaan tata usaha kepaniteraan, pengelolaan fasilitas dan layanan teknis persidangan.

Fungsi:

1. Pelaksanaan pelayanan hukum;
2. Pengelolaan tata usaha kepaniteraan; dan
3. Pelaksanaan fasilitas dan pelayanan teknis persidangan.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi	Skor 80	Skor 80	Skor 80	Skor 80	Skor 87	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Biro Renkeu melalui Survei
		2. Persentase Tersedianya Data Penanganan Perkara Konstitusi	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Biro HAK



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2020	2021	2022	2023	2024		
		3. Tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Skor 75	Skor 77	Skor 79	Skor 81	Skor 82	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Biro HAK
		4. Persentase Terselenggaranya Layanan Penguatan Kode Etik melalui MKMK					100%	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	
2	Meningkatnya Kualitas Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	1. Persentase Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Biro HAK
3	Meningkatnya Kualitas Anotasi Undang-Undang	1. Persentase Tersedianya Data Anotasi Undang-Undang	80%	80%	80%	80%	87%	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Biro HAK
		2. Persentase Tersedianya Data Landmark Decision kepaniteraan	80%	80%	80%	80%	100%	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Biro HAK
4	Meningkatnya kualitas Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis	1. Persentase Tersedianya Konsep DIM (Daftar Inventaris Masalah) Perubahan/ Penyempurnaan Kebijakan	80%	80%	80%	80%	100%	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Biro HAK
		2. Persentase tersusunnya Draft Peraturan (PMK, PKMK, Persekjen, dan Peraturan terkait lainnya)	80%	80%	80%	80%	100%	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Biro HAK



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2020	2021	2022	2023	2024		
5	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri					Nilai 79	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Kemenpan & RB
		2. Indeks ASN BerAKHLAK					Nilai 61	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Kemenpan & RB
		3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)					A	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Kemenpan & RB
		4. Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektoral (EPSS)					Nilai 2,7	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	BPS
		5. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko					Nilai 3	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Inspektorat
		6. Nilai Evaluasi SAKIP Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan					B	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Inspektorat



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
TAHUN 2020-2024**

Nama Unit Organisasi:

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

Tugas:

Melaksanakan hubungan masyarakat dan kerjasama dalam negeri, sekretariat tetap AACC dan kerja sama luar negeri, serta tata usaha pimpinan dan protokol.

Fungsi:

1. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama dalam negeri;
2. Pelaksanaan kesekretariatan tetap asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia dan/atau institusi sejenis dan kerja sama luar negeri; dan
3. Pelaksanaan ketatausahaan pimpinan dan keprotokolan.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Meningkatnya efektifitas kerjasama luar negeri dan Dalam Negeri	1. Layanan Publik Peningkatan Pemahaman mengenai Pancasila, Konstitusi dan MK serta Penyebarluasan Informasi di	80%	95%	95%	95%	100%	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Biro HP



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2020	2021	2022	2023	2024		
		Pelaksanaan Kegiatan Internasionalisasi MK yang efektif							
		2. Persentase Layanan Publik, Peningkatan Pemahaman, Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Dalam Negeri yang efektif	80%	80%	80%	90%	100%	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Biro HP
		3. Layanan Publik Kegiatan Sektap AACC yang efektif	80%	80%	80%	85%	94%	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Biro HP
2	Meningkatnya kualitas penyebarluasan informasi perkara dan putusan MK dan layanan kehumasan dan Keprotokolan	1. Layanan Publik Penyediaan Digitalisasi Bahan Publikasi Informasi MK	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Biro HP
		2. Layanan Publik Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Putusan MK di Media Elektronik	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Biro HP



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2020	2021	2022	2023	2024		
		3. Layanan Publik Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Mahkamah Konstitusi di Media Elektronik	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Biro HP
		4. Tingkat Layanan Kehumasan dan Keprotokolan	Skor 75	Skor 75	Skor 75	Skor 75	Skor 81	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Biro Renkeu melalui Survei
		5. Layanan Publik Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Kegiatan Penanganan Perkara MK di Media Elektronik				100%	100%	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Biro HP
		6. Layanan Publik Monitoring Pemberitaan MK di Media				95%	100%	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Biro HP
		7. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik MK				Skor 75	Nilai 90	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Komisi Informasi Pusat
		8. Indeks Aksesibilitas Penanganan Perkara					Skor 70	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Biro Renkeu



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2020	2021	2022	2023	2024		
									melalui Survei
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Humas dan Protokol	1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri					Nilai 79	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Kemempn & RB
		2. Indeks ASN BerAKHLAK					Nilai 61	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Biro SDMO
		3. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko					Nilai 3	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Inspektora
		4. Nilai Evaluasi SAKIP Biro Humas dan Protokol					B	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Inspektora



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BIRO UMUM
TAHUN 2020-2024**

Nama Unit Organisasi:

Biro Umum

Tugas:

Melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, pengamanan, pengadaan, perlengkapan serta penatausahaan barang milik negara.

Fungsi:

1. Pengelolaan rumah tangga, arsip dan ekspedisi;
2. Pelaksanaan pengamanan; dan
3. Pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa, pengelolaan perlengkapan dan penatausahaan barang milik negara.

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan, Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Perlengkapan Barang Milik Negara serta	1. Presentase Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Rencana Umum Pengadaan	70%	70%	70%			Biro Umum	-



NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2020	2021	2022	2023	2024		
	Pelayanan Umum Lainnya	2. Persentase terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) sesuai standar MK	80%	85%	90%			Biro Umum	-
		3. Persentase Digitalisasi Arsip Perkara	90%	90%	90%			Biro Umum	-
		4. Persentase Layanan Pemeliharaan Barang Milik Negara	85%	85%	85%			Biro Umum	-
		5. Persentase Layanan Penatausahaan Barang Milik Negara	100%	100%	100%			Biro Umum	-
		6. Tingkat layanan kerumahtanggaan, Perlengkapan dan Pengamanan	Skor 80	Skor 80	Skor 80	Skor 80	Skor 86	Biro Umum	Biro Renkeu melalui Survei
		7. Persentase terpenuhinya sarana prasarana pelayanan publik sesuai permintaan	70%	70%	70%	85%	100%	Biro Umum	Biro Umum
		8. Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)				Skor 80	Skor 65	Biro Umum	LKPP
		9. Tingkat Digitalisasi Arsip				Skor 80	Skor 90	Biro Umum	ANRI
		10. Indeks Pengelolaan Aset				Skor 80	Nilai 2,5	Biro Umum	Kemenkeu



NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2020	2021	2022	2023	2024		
2	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Umum	1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri					Nilai 79	Biro Umum	Kemenpan & RB
		2. Indeks ASN BerAKHLAK					Nilai 61	Biro Umum	Kemenpan & RB
		3. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko					Nilai 3	Biro Umum	Inspektorat
		4. Nilai Evaluasi SAKIP Biro Umum					B	Biro Umum	Inspektorat



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2020-2024**

Nama Unit Organisasi:

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan (Pusat P4)

Tugas:

Melaksanakan penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan perpustakaan dan sejarah konstitusi.

Fungsi:

1. Pelaksanaan penelitian;
2. Pelaksanaan pengkajian perkara;
3. Pelaksanaan penelaahan perkara;
4. Pelaksanaan penyiapan konsep pendapat hukum;
5. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan karya tulis ilmiah;
6. Pengelolaan terbitan berkala ilmiah;
7. Penyusunan naskah akademis draft peraturan;
8. Pengelolaan perpustakaan dan sejarah konstitusi; dan
9. Pelaksanaan ketatausahaan Pusat.

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1. Presentase mutu penelitian Hukum yang sesuai dengan standar penelitian	50%	60%	70%			Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan	-



NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2020	2021	2022	2023	2024		
		2. Persentase hasil studi perkara yang tepat waktu	75%	80%	85%	90%	94%	Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan	Pusat P4
		3. Persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum / Pertimbangan Hukum.	80%	80%	80%	80%	100%	Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan	Pusat P4
		4. Persentase pemuatan karya ilmiah peneliti pada jurnal nasional dan internasional serta forum atau media ilmiah lainnya.	60%	60%	60%			Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan	-
		5. Persentase ketersediaan bahan pustaka bidang hukum dan konstitusi	80%	80%	80%	80%	100%	Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan	Pusat P4
		6. Tingkat Layanan Asistensi Ahli Hakim Konstitusi dan Pengelolaan Perpustakaan	Skor 75	Skor 77	Skor 79	Skor 81	Skor 82	Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan	Biro Renkeu melalui Survei



NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2020	2021	2022	2023	2024		
		7. Tingkat layanan kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi					Skor 75	Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan	Biro Renkeu melalui Survei
2	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan	1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri					Nilai 79	Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan	Kemenpan & RB
		2. Indeks ASN BerAKHLAK					Nilai 61	Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan	Kemenpan & RB
		3. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko					Nilai 3	Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan	Inspektorat
		4. Nilai Evaluasi SAKIP Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan					B	Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan	Inspektorat



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI
TAHUN 2020-2024**

Nama Unit Organisasi:

Pusat Teknologi Informasi Komunikasi

Tugas:

Melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan layanan data, serta pengelolaan infrastruktur, jaringan, dan komunikasi.

Fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi dan layanan data;
2. Pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan sistem informasi dan layanan data;
3. Pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan sistem aplikasi;
4. Pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan jaringan infrastruktur dan komunikasi;
5. Pembinaan teknologi informasi, komunikasi dan data;
6. Pengamanan teknologi informasi, komunikasi dan data;
7. Pelaksanaan analisis kebutuhan dan kerja sama; dan
8. Pelaksanaan ketatausahaan Pusat.

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Meningkatnya Pelayanan JAS dan GAS	1. Persentase Judicial Administration	75%	75%	75%	75%	95%	Pusat Teknologi Informasi Komunikasi	Pusat Teknologi Informasi Komunikasi



NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2020	2021	2022	2023	2024		
	berbasis Elektronik	System berbasis Elektronik							
		2. Persentase General Administration System berbasis Elektronik	75%	75%	75%	75%	95%	Pusat Teknologi Informasi Komunikasi	Pusat Teknologi Informasi Komunikasi
		3. Tingkat Layanan Sistem Informasi	Skor 80	Skor 80	Skor 80	Skor 80	Skor 82	Pusat Teknologi Informasi Komunikasi	Biro Renkeu melalui Survei
		4. Indeks SPBE				Skor 80	Indeks 3,36	Pusat Teknologi Informasi Komunikasi	Kemenpan & RB
		5. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE					Indeks 2	Pusat Teknologi Informasi Komunikasi	Kemenpan & RB
		6. Persentase Pengolahan Data dan Penyajian Informasi Mahkamah Konstitusi					100%	Pusat Teknologi Informasi Komunikasi	Pusat Teknologi Informasi Komunikasi
2	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi	1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri					Nilai 79	Pusat Teknologi Informasi Komunikasi	Kemenpan & RB



NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2020	2021	2022	2023	2024		
	Birokrasi pada Pusat Teknologi	2. Indeks ASN BerAKHLAK					Nilai 61	Pusat Teknologi Informasi Komunikasi	Kemenpan & RB
	Informasi Komunikasi	3. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)					Nilai 2,7	Pusat Teknologi Informasi Komunikasi	BPS
		4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi				Skor 80	Skor 88	Pusat Teknologi Informasi Komunikasi	Biro Renkeu melalui Survei
		5. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko					Nilai 3	Pusat Teknologi Informasi Komunikasi	Inspektorat
		6. Tingkat pemenuhan kriteria Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani					Nilai 92	Pusat Teknologi Informasi Komunikasi	Inspektorat
		7. Nilai Evaluasi SAKIP Pusat Teknologi Informasi Komunikasi					B	Pusat Teknologi Informasi Komunikasi	Inspektorat



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI
TAHUN 2020-2024**

Nama Unit Organisasi:

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Tugas:

Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Fungsi:

1. Penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi; dan
2. Pengelolaan sarana, prasarana, dan ketatausahaan pusat.

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara MK	1. Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75	Skor 75	Skor 75	Skor 75		Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	-
		2. Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara					Skor 76	Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	Biro Renkeu melalui Survei
		3. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Nilai 3.25	Nilai 3.25	Nilai 3.25	Nilai 3.3	Nilai 3.6	Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	Pusdik Pancasila dan Konstitusi



NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2020	2021	2022	2023	2024		
		4. Persentase Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara	-	77%	77%			Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	-
2	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri					Nilai 79	Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	Kemenpa & RB
		2. Indeks ASN BerAKHLAK					Nilai 61	Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	Kemenpa & RB
		3. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)					Nilai 2,7	Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	BPS
		4. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko					Nilai 3	Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	Inspektorat
		5. Tingkat pemenuhan kriteria Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani					Nilai 92	Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	Inspektorat
		6. Indeks Administrasi Umum Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi					Skor 81	Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	



NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2020	2021	2022	2023	2024		
		7. Nilai Evaluasi LAKIP (SAKIP) Pusdik Pancasila dan Konstitusi					B	Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	Inspektorat



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT
TAHUN 2020-2024**

Nama Unit Organisasi:

Inspektorat

Tugas:

Melaksanakan pengawasan intern dan pencegahan korupsi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal.

Fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern dan pencegahan korupsi;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal;
3. Penyelenggaraan pencegahan korupsi serta pembangunan sistem dan budaya integritas;
4. Penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal;
5. Penyelenggaraan pengawasan, investigasi, klarifikasi, dan/atau pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal;
6. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat.



NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Meningkatnya Implementasi SPIP dan Profesionalisme Aparat Pengawasan	1. Tingkat Maturitas SPIP	nilai 3	Inspektorat	BPKP				
		2. Tingkat Kapabilitas APIP	level 3	Inspektorat	BPKP				
		3. Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	65%	70%	75%	85%	96%	Inspektorat	Inspektorat
		4. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK					93%	Inspektorat	Inspektorat
		5. Tingkat Layanan Pengawasan Intern	Skor 75	Skor 77	Skor 79	Skor 81	Skor 81	Inspektorat	Biro Renkeu melalui Survei
2	Terwujudnya Budaya Anti Korupsi dan Bebas Pungli	1. Persentase Laporan Gratifikasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Inspektorat	Inspektorat
		2. Tingkat Kepatuhan penyampaian LHKPN yang tepat waktu	90%	90%	90%	90%	100%	Inspektorat	Inspektorat
		3. Persentase Tindaklanjut atas Laporan Kejadian Pungli	100%	100%	100%	100%	100%	Inspektorat	Inspektorat
		4. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan					Nilai 4	Inspektorat	Kemenpan & RB



NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2020	2021	2022	2023	2024		
		5. Persentase Penyelesaian Pengaduan melalui Whistle Blower System (WBS)					100%	Inspektorat	Inspektorat
3	Terwujudnya Budaya Integritas MK	1. Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja menuju WBK dan WBBM	2 unit kerja	3 unit kerja	3 unit kerja				
		2. Persentase Pakta Integritas yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Inspektorat	Inspektorat
		3. Indeks Integritas					Skor 80	Inspektorat	KPK
4	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat	1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri					Nilai 79	Inspektorat	Kemenpan & RB
		2. Indeks ASN BerAKHLAK					Nilai 61	Inspektorat	Biro SDMO
		3. Indeks Manajemen Risiko					Nilai 3	Inspektorat	Inspektorat
		4. Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat					B	Inspektorat	Inspektorat

